

## **ABSTRAK**

### **PENGUNAAN HASIL ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Syifa Maharani**

Penanganan pelaku penyalahguna narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya melalui asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan proses evaluasi yang melibatkan berbagai aspek, termasuk medis, psikososial, dan hukum, guna menentukan bentuk intervensi yang tepat bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hasil asesmen terpadu dalam proses penegakan hukum dan rehabilitasi di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, kejaksaan, serta lembaga rehabilitasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen terpadu merupakan mekanisme yang melibatkan tim hukum dan tim medis untuk menganalisis kondisi tersangka, meliputi tingkat keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan tingkat ketergantungan narkotika. Hasil asesmen tersebut memberikan rekomendasi kepada hakim, apakah penyalahguna sebaiknya menjalani rehabilitasi atau mendapatkan sanksi pidana yang lebih berat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan hasil asesmen terpadu sebagai dasar pertimbangan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya asesmen terpadu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.

Selanjutnya, terdapat juga kecenderungan beberapa aparat hukum untuk lebih mengutamakan pendekatan represif daripada pendekatan rehabilitatif, meskipun hasil asesmen telah merekomendasikan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asesmen terpadu memiliki peran strategis dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, optimalisasi pelaksanaan asesmen terpadu sangat diperlukan agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem peradilan pidana.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini mencakup beberapa aspek penting untuk mendukung efektivitas penggunaan hasil asesmen terpadu dalam penanganan pelaku penyalahguna narkotika di Provinsi Lampung. Pertama, perlu adanya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan pentingnya asesmen terpadu. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan yang menekankan bahwa asesmen terpadu bukan hanya prosedur administratif, melainkan instrumen penting dalam menciptakan keadilan restoratif. Pemahaman yang lebih baik akan mendukung keputusan hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan.

**Kata Kunci: Asesmen Terpadu, Narkotika, Rehabilitasi.**

## **ABSTRACT**

### **THE USE OF INTEGRATED ASSESSMENT RESULTS IN HANDLING DRUG ABUSERS IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**Syifa Maharani**

Handling drug abusers requires a comprehensive approach, one of which is through integrated assessment. Integrated assessment is an evaluation process that involves various aspects, including medical, psychosocial, and legal factors, to determine the appropriate intervention for drug abusers. This study aims to analyze the use of integrated assessment results in the law enforcement and rehabilitation process in Lampung Province. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies involving relevant institutions such as the National Narcotics Agency (BNN), the police, the prosecutor's office, and rehabilitation centers.

The findings indicate that integrated assessment is a mechanism involving legal and medical teams to analyze the suspect's condition, including their level of involvement in drug trafficking networks and their level of drug dependence. The assessment results provide recommendations to judges on whether the abuser should undergo rehabilitation or receive stricter criminal sanctions. However, in practice, the use of integrated assessment results as a legal consideration still faces several challenges. Some obstacles include a lack of understanding among law enforcement officers about the importance of integrated assessment, limited facilities and infrastructure, and insufficient coordination between relevant institutions.

Furthermore, there is a tendency among some law enforcement officers to prioritize a repressive approach over a rehabilitative one, despite assessment results recommending rehabilitation. This study concludes that integrated assessment plays a strategic role in supporting the restorative and rehabilitative justice approach mandated by Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, optimizing the implementation of integrated assessments is crucial to ensuring their maximum utilization within the criminal justice system.

*Syifa Maharani*

Based on this study, several recommendations can be made to enhance the effectiveness of integrated assessment results in handling drug abusers in Lampung Province. First, there is a need to improve law enforcement officers' understanding of the concept and significance of integrated assessment. This can be achieved through continuous training and socialization, emphasizing that integrated assessment is not merely an administrative procedure but an essential instrument in achieving restorative justice. Better understanding will support legal decisions that not only punish but also rehabilitate.

**Keywords: Integrated Assessment, Narcotics, Rehabilitation.**